



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARJUKI
2. Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3. NHK : 71185

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 472.794.760

1. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 39.200.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, WARISAN Rp. 39.200.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1937 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 256.209.560
4. Tanah Seluas 21250 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 31.650.000
5. Tanah Seluas 9250 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 18.130.000
6. Tanah Seluas 17920 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.534.400
7. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 37.870.800

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 30.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN ALTIS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.200.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 529.994.760



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

529.994.760

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.